

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

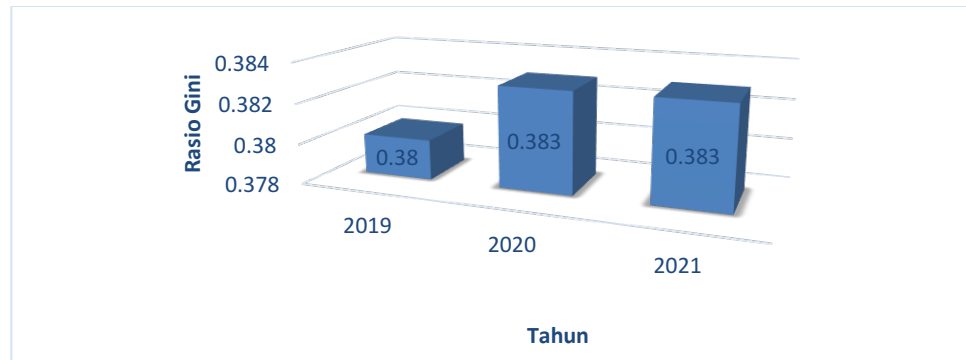
Struktur ekonomi mencerminkan karakteristik dasar perekonomian di suatu negara berdasarkan lapangan usaha atau sektor pada periode tertentu. Struktur ekonomi di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa sektor di setiap periodenya. Dalam kurun waktu 2009-2014, struktur ekonomi terdiri dari 9 sektor antara lain sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa (BPS, 2014). Pada periode setelahnya yaitu tahun 2014-2019, struktur ekonomi diklasifikasikan menjadi 17 sektor antara lain sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya (BPS, 2019)

Struktur ekonomi juga merupakan kontribusi setiap sektor dalam perekonomian baik berdasarkan pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier ataupun berdasarkan lapangan usaha. Pada penelitian ini, sektor yang digunakan antara lain sektor pertanian, industri dan jasa (Kuznet, 1955) serta sektor yang terdampak Covid-19 yaitu sektor perdagangan (BPS, 2019). Berbagai macam sektor pada struktur ekonomi juga terdampak Covid-19 yang mengakibatkan aktivitas ekonomi mengalami perubahan yang signifikan karena adanya berbagai kebijakan pemerintah pada masa Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan lain sebagainya. Dengan adanya kebijakan ini mengakibatkan terhambatnya pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya pada masa Covid-19.

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang direncanakan untuk diwujudkan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah. Pembangunan ini bertujuan untuk mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia sehingga terbentuk sinergitas kemitraan antara pemerintahan dan sektor swasta untuk menambah lapangan pekerjaan baru. Hal ini dilakukan untuk mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi dalam wilayah pembangunan (Blakely, 1989). Pembangunan ekonomi perlu diimbangi dengan pemerataan distribusi pendapatan melalui tiga pendekatan pendapatan nasional yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan. Semakin tidak meratanya distribusi pendapatan di masyarakat berarti semakin tinggi juga ketimpangan pendapatannya. Tingginya ketimpangan pendapatan akan semakin memperdalam kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan rendah (*low income*) dengan mereka yang berpenghasilan tinggi (*high income*) (Sungkar, dkk., 2015).

Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan beberapa indikator salah satunya rasio gini. Di beberapa negara Asia Tenggara juga mengalami ketimpangan contohnya Malaysia, Singapura dan Thailand. Pada tahun 2019, negara Malaysia memiliki nilai rasio gini sebesar 0,63 (Cugat dan Narita, 2020), yang menunjukkan ketimpangan berat. Kemudian pada negara Singapura yang merupakan negara maju juga mengalami ketimpangan pada tahun yang sama yaitu sebesar 0,65. Beda halnya di negara Thailand yang ketimpangannya tergolong rendah yaitu sebesar 0,35.

Berdasarkan gambar 1.1, ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2019 menunjukkan angka rasio gini sebesar 0,380. Menurut Todaro (2006), nilai rasio gini yang berada di kisaran 0,36 - 0,49 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang. Pada tahun 2020, angka rasio gini mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen hingga mencapai angka 0,383. Peningkatan angka rasio gini tahun 2020 termasuk salah satu dampak pandemi Covid-19 yang menunjukkan distribusi pendapatan daerah yang semakin timpang dalam nilai tertentu.



**Gambar 1.1 Rata-rata Rasio Gini 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2021**

Sumber: BPS, olahan data Tahun 2021.

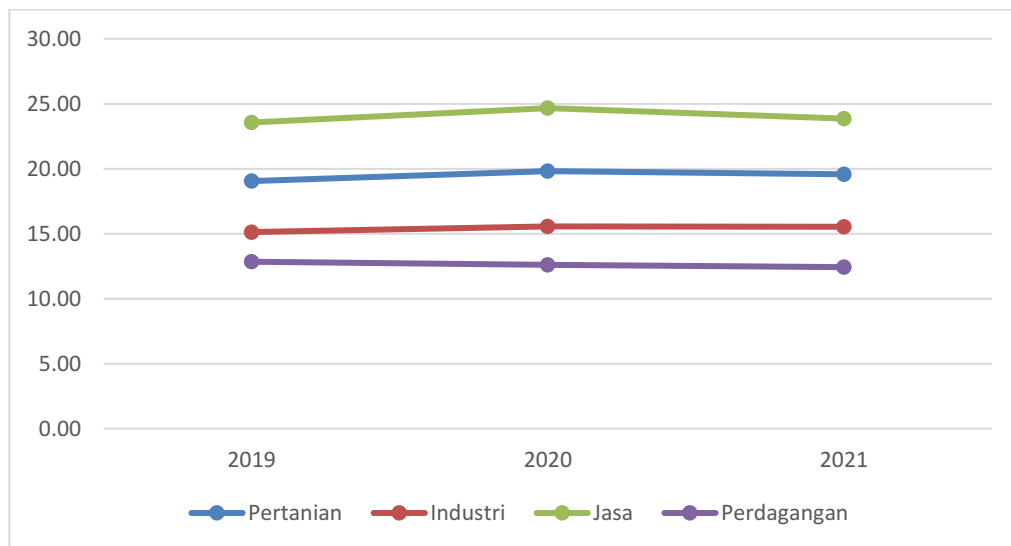
Kenaikan angka rasio gini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain struktur ekonomi, upah minimum, IPM, jumlah penduduk angka partisipasi sekolah, persentase penduduk miskin, populasi serikat pekerja, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain (Nangarumba., 2015; Litwin., 2015; Putri, *et al.*, 2015; Vredrich, *et al.*, 2015 dan Rantung., 2015).

Ketimpangan pendapatan membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah peningkatan ketimpangan pendapatan pada tingkat tertentu dapat menciptakan peluang bagi masyarakat supaya lebih berinovasi dan bekerja keras agar memperoleh imbalan yang diinginkan. Sedangkan dampak negatifnya merupakan salah satu masalah dalam suatu negara yang masih belum terselesaikan.

Ketimpangan yang terlalu tinggi pada tingkat tertentu memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti memperlambat pengurangan kemiskinan (World Bank Document, 2015). Menurut Suharyadi, dkk (2012) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada sektor industri memberikan dampak relatif besar terhadap penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi kontribusinya relatif kecil terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Kontribusi yang nyata terhadap pengurangan kemiskinan berasal dari sektor jasa (Suharyadi, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia masih terjadi ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Ini menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi di Indonesia berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, sehingga proses pembangunan yang dilakukan tidak bisa dirasakan oleh semua kelompok masyarakat.

Hampir semua negara di dunia sedang mengalami ketimpangan, hanya saja perbedaannya terletak pada nilai rasio gini itu sendiri. Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya perubahan pada struktur ekonomi. Cheong dan Wu (2014) membuktikan dalam penelitiannya mengenai hubungan antara distribusi pendapatan dan struktur ekonomi. Dalam struktur ekonomi terdapat perubahan khususnya peningkatan di sektor industri sangat berkontribusi dalam peningkatan standar hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, meskipun pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersamaan dengan melebarnya kesenjangan pada distribusi pendapatan di China.



**Gambar 1.2. Rata-rata *Share* PDRB Sektor Pertanian, Industri, Jasa dan perdagangan 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2021**

Sumber: BPS, 2021

Di Indonesia, struktur ekonomi juga telah mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya peningkatan kontribusi pada ketiga sektor penting. Pada tahun 2020, sektor pertanian meningkat 4,04 persen. Sedangkan pada sektor industri mengalami peningkatan

yang tidak terlalu tajam yaitu sebesar 2,84 persen. Lain halnya dengan sektor jasa yang menunjukkan fluktuasi selama periode 2019-2021. Pada tahun 2019, sektor ini berkontribusi terhadap perekonomian sebesar 23,56 persen dan terus tumbuh mencapai 24,66 persen di tahun 2020. Dalam penyusunan PDB, sektor yang kontribusinya paling dominan adalah sektor jasa (BPS, 2018).

Berdasarkan gambar 1.2, kontribusi masing-masing sektor telah mengakibatkan perubahan setiap tahunnya. Struktur perekonomian memiliki definisi yaitu besar *share* lapangan usaha atas total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan harga konstan maupun harga berlaku. Dengan melihat struktur dalam perekonomian suatu negara, maka konsentrasi lapangan usaha di suatu wilayah yang sangat dominan dapat dengan mudah diketahui. Pada penelitian ini menggunakan harga berlaku karena bertujuan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi (BPS, 2018).

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah upah minimum. Para ahli ekonomi mengemukakan upah minimum dapat menurunkan tingkat kesenjangan. Upah minimum redistribusi pendapatan dengan meningkatkan upah pekerja (dalam hal ini upah minimum) dan menurunkan keuntungan perusahaan (Volscho, 2005; Levitan dan Belous, 1979). Sehingga adanya upah minimum menjadikan kriteria upah lebih tinggi serta diharapkan dapat mewujudkan pendapatan dan distribusi upah yang lebih adil (Bluestone dan Harrison, 2001).

Pada teori redistribusi (Freeman, 1996) mengatakan bahwa upah minimum menggeser distribusi pendapatan bawah melalui mekanisme produk milik konsumen yang diproduksi oleh pekerja berupa minimum. Kenaikan upah minimum mengakibatkan peningkatan pada biaya produksi barang dan jasa. Ketika biaya produksi naik, perusahaan juga akan meningkatkan harga mereka. Pada dasarnya, upah minimum berfokus pada pekerja berpenghasilan rendah. Ketika para pekerja berupa rendah meningkat, pada saat yang bersamaan daya beli pekerja menurun karena peningkatan harga tersebut. Penurunan daya beli pekerja mengubah kesetaraan sehingga mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan parameter perbandingan dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan perkapita di dalam suatu negara (BPS dan UNDP, 1997). Pada beberapa studi, IPM dianggap salah satu variabel yang signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan (Putri, *et al.*, 2018; Hakim. F.Z., 2018). Indeks Pembangunan Manusia menjadi tolok ukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup yang digunakan untuk mengelompokkan suatu negara termasuk dalam tiga kelompok yaitu negara maju, berkembang, dan terbelakang.

Menurut UNDP (*Human Development Report*, 1995) asumsi penting pembangunan manusia yaitu penduduk menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Pembangunan dilakukan bukan hanya untuk menaikkan pendapatan mereka, melainkan untuk memperbanyak pilihan bagi masyarakat. Sehingga teori pembangunan manusia ditujukan bukan hanya dalam aspek ekonomi, melainkan harus terkonsentrasi secara keseluruhan pada penduduk. Pembangunan manusia direncanakan fokus terhadap upaya pemanfaatan kemampuan manusia secara optimal. Pembangunan manusia adalah langkah awal dalam menetapkan tujuan dan pilihan pembangunan supaya dengan mudah dicapai.

Penduduk adalah komponen penting dari pembangunan ekonomi. Sebuah negara dengan jumlah penduduk yang besar jika kualitas pendidikan dan kesehatannya tidak memadai akan menghambat pembangunan ekonomi. Data terbaru Worldometer dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) April 2022, populasi penduduk Indonesia adalah 278.752.361 jiwa. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi dan juga menempati penduduk terbanyak ke-4 di dunia.

Dari tahun ke tahun, penduduk yang memiliki jumlah semakin banyak berpotensi meningkatkan ketimpangan pada golongan masyarakat, salah satunya yaitu berkurangnya kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia juga semakin tinggi. Tingginya jumlah angkatan kerja, bila tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah kesempatan kerja akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan.

Pada penelitian Murty (2000) menyatakan penduduk berperan dalam proses pembangunan dan perencanaan ekonomi di suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas keputusan pembangunan dan perencanaan ekonomi melalui sumber informasi dan kebijakan. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional dibutuhkan keahlian dan ketrampilan pada sumber daya manusia sesuai bidangnya. Hubungan timbal balik terjadi antara kependudukan nasional dan pembangunan ekonomi sehingga keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.

Pada penelitian Brito dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa upah minimum memiliki kontribusi sebesar 64 persen terhadap penurunan ketimpangan pendapatan yang diamati antara tahun 1995 dan 2014. Pensiun adalah saluran yang paling relevan dalam analisis ini selama periode 1995-2014. Hasil penelitian dari beberapa studi mengatakan bahwa upah minimum signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Mohammad & Firmansyah (2018) menemukan hasil bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sementara itu Sungkar dkk (2015) mengatakan sebaliknya, bahwa variabel upah minimum dan ketimpangan pendapatan terdapat hubungan positif. Saat nilai upah minimum naik, maka yang akan terjadi adalah peningkatan pada ketimpangan pendapatan. Perbedaan argumen ini menarik untuk diperdalam tentunya dengan data yang terbaru.

Penjelasan sebelumnya memberikan landasan yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian ini antara lain ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia penting untuk dianalisis, apabila angka ketimpangan tinggi hal itu menghambat pembangunan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh rasio gini di berbagai daerah menunjukkan angka yang berbeda-beda sehingga ketimpangan pendapatan di daerah khususnya di tingkat provinsi masih tergolong ketimpangan pendapatan sedang dan relatif merata. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah regresi data panel, sehingga judul penelitian ini yaitu “Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum, IPM dan Populasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada Tahun 2019-2021”.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Pengaruh struktur ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan telah banyak diteliti oleh berbagai peneliti di beberapa negara dengan hasil yang beragam. Studi sebelumnya mengenai ketimpangan pendapatan menggunakan variabel independen struktur ekonomi yang terdiri dari 4 sektor yaitu *share* PDRB sektor pertanian, industri, jasa, perdagangan, Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk (Afandi dkk., 2017; Nangarumba. M., 2015; Roifuddin dan Firmansyah., 2017; Rantung., 2015, Putri, *et al.*, 2015). Selain itu, beberapa peneliti juga telah membahas mengenai ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh inflasi, investasi asing langsung, *Corruption Perception Index* (CPI), dan lain-lain (Hakim, F.Z., 2018; Bratoeva dan Manoleva., 2017). Untuk perkiraan model yang sering digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah regresi data panel, *Ordinary Least Square* (OLS) dan juga metode dekomposisi. (Hakim., 2018; Brito., 2017; Rofiuddin., 2018)

Hasil penelitian menyatakan peningkatan sektor pertanian dan industri berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yaitu cenderung mengurangi ketimpangan, sedangkan peningkatan sektor jasa dan jumlah penduduk cenderung meningkatkan ketimpangan. Hasil penelitian lain menemukan bahwa peningkatan sektor pertanian dapat mengatasi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia yang artinya berpengaruh secara negatif. Sedangkan peningkatan sektor jasa justru berpengaruh positif yaitu dapat memperburuk ketimpangan ketimpangan pendapatan (Rantung, 2015). Selanjutnya hasil dari penelitian lain (Rofiuddin dan Firmansyah., 2018; Suzana dan Kapantow., 2015) menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP), *Corruption Perception Index* (CPI), IPM memiliki hubungan negatif akan ketimpangan pendapatan, serta variabel lainnya seperti jumlah penduduk yang dianggap tidak berpengaruh signifikan dalam ketimpangan pendapatan (Hakim., 2018; Brito., 2017; Rofiuddin., 2018).

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan dan hasil penelitian. Variabel yang digunakan adalah 7 variabel independen yaitu *share* PDRB

sektor pertanian, industri, jasa, perdagangan, upah minimum, IPM dan jumlah penduduk. Sebagian besar studi sebelumnya yang membahas tentang pengaruh struktur ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan diantaranya hanya memasukkan variabel sektor pertanian, manufaktur dan sektor jasa saja. Sedangkan pada hasil penelitian menunjukkan hasil berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya seperti variabel upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru tidak signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh struktur ekonomi, upah minimum, IPM dan populasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2019-2021 secara simultan maupun parsial.

### **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data dari BPS periode 2019-2021. Estimasi model yang digunakan adalah regresi data panel dengan model terbaik yaitu *Random Effect* (REM). Variabel terikat yang digunakan antara lain ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari *share* PDRB sektor pertanian, industri, jasa, perdagangan, upah minimum, IPM dan jumlah penduduk.

### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menyimpulkan dua hal. Secara simultan, seluruh variabel independen yang digunakan signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Secara parsial, *share* PDRB sektor pertanian dan industri signifikan berpengaruh negatif pada ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2019-2021. Sedangkan variabel *share* PDRB sektor jasa dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan pada ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2019-2021. Sementara itu, variabel *share* PDRB sektor perdagangan, upah minimum dan IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2019-2021.

## **1.6 Kontribusi Riset**

1. Sebagai bahan referensi dalam kajian ilmu ekonomi pembangunan dan pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Sebagai bahan pertimbangan kepada pemangku kebijakan dalam menetapkan kebijakan yang tepat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Sebagai bahan masukan kepada pemangku kebijakan dalam menentukan program-program pengurangan ketimpangan pendapatan.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi latar belakang, tujuan melakukan penelitian, kesenjangan penelitian, ringkasan penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Pada bagian ini juga terdiri dari studi sebelumnya dan hipotesis penelitian.

### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisi mengenai pendekatan penelitian, definisi operasional variabel, rancangan model yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, dan juga teknik analisis.

### **BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi gambaran umum, deskripsi statistik variabel, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis, pembahasan mengenai hasil analisis.

### **BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini menjelaskan akhir yang terdiri dari simpulan, saran yang diberikan kepada beberapa pihak serta keterbatasan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**